



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Minggu

Tanggal: 03 November 2019

Halaman: 1

DIRESTUI KPK, FUNGSI JALAN SUPOMO SEGERA DIPULIHKAN

Abdul Hamid Razak
harmidi@harianjogja.com

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan melanjutkan proyek Saluran Air Hujan (SAH) Supomo dan sekitarnya yang tersandung kasus operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Hanya saja, perbaikan yang dilakukan bersifat sementara.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan kelanjutan proyek tersebut hanya mengembalikan fungsi jalan tersebut seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan agar jalan tersebut bisa kembali digunakan oleh masyarakat.

"Kelanjutan proyek hanya mengembalikan fungsi [sebagai jalan], diuruk lagi, diaspal lagi. Insyaallah akan dimulai dikerjakan pekan depan," katanya kepada *Harian Jogja*, Sabtu (2/11).

Dijelaskan Heroe, Pemkot hanya bisa mengembalikan fungsi jalan terlebih dulu. Sebab jika dipaksakan melanjutkan proyek SAH tersebut tahun ini maka waktu dua bulan tersisa tidak akan mencukupi.

► Halaman 6

DIRESTUI KPK...

Belum lagi dilakukan proses tender ulang yang membutuhkan waktu tidak sedikit. "Tidak ada yang sanggup, kan tinggal dua bulan lagi. Makanya kami kembalikan fungsi jalannya dulu, yang sudah terlanjur terlalu diusik. Untuk kelanjutan proyek akan dilakukan tahun depan dikerjakan," ujar Heroe.

Keputusan tersebut diamalkan setelah ada sinyal dari KPK jika Pemkot bisa mengerjakan kembali proyek SAH tersebut. Dia berharap pengembalian fungsi jalan di lokasi segera dilakukan mengingat musim hujan sudah tiba.

Jika tidak segera dikerjakan dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru. "Untuk teknis dan targetnya nanti biar DPU yang tentukan. Termasuk anggarannya. Senin atau Selasa akan dilakukan koordinasi dulu, kemungkinan Rabu baru dikerjakan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Agus Tri Haryono, mengatakan untuk menindaklanjuti proyek tersebut Pemkot membutuhkan rekomendasi dari KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Meski rekomendasi dari LKPP sudah keluar namun selama KPK belum memberi rekomendasi, Pemkot belum berani menindaklanjuti proyek itu.

"Kami memang merencanakan menata kembali lokasi proyek agar tidak mengganggu transportasi dan aktivitas warga," katanya.

Kasus ini bermula setelah KPK melakukan OTT proyek senilai Rp8,3 miliar ini pada Selasa (20/8). Padahal kontraktor pemenang lelang sudah menggali jalan Babaran. Di lokasi tersebut, ruas jalan sepanjang sekitar 200 meter telah dibongkar sehingga menyisakan beberapa titik lubang. Sedangkan warga belum mendapatkan kejelasan bagaimana tindak lanjut Pemkot.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005